

PENGARUH BELANJA LANGSUNG, BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DIKOTA MANADO*THE EFFECT OF DIRECT EXPENDICTURE, INDIRECT SPENDING AND GENERAL ALLOCATION FUNDS AGAINST POVERTY IN MANADO CITY*

Oleh:

Patricia M. I. Bawimbang¹**Ita Pingkan Rorong²****Hanly F Dj Siwu³**^{1,2,3}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail :

¹Patriciabawimbang@yahoo.co.id²itapingkan@unsrat.ac.id³Hanlysiwu@gmail.com

Abstrak. Masalah kemiskinan dianggap sebagai salah satu hal yang menghambat proses pembangunan sebuah negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih terjebak dalam masalah kemiskinan yang hingga saat ini belum sepenuhnya teratasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemiskinan Dikota Manado. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diolah menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk runtut waktu (timeseries) yang merupakan data tahunan (tahun 2004-2018). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian secara parsial, Belanja Langsung tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap angka Kemiskinan di kota Manado, Belanja Tidak Langsung berpengaruh signifikan secara statistik terhadap Kemiskinan di kota Manado, dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap Kemiskinan dikota Manado. Sedangkan untuk penelitian secara simultan Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kemiskinan dikota Manado.

Kata Kunci: *Kemiskinan, Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Dana Alokasi Umum*

Abstract. *The problem of poverty is considered as one of the things that hinders the development process of a country. Indonesia is one of the countries still caught up in the poverty problem that until now has not been fully resolved. The research aims to determine the Effect of Direct Expenditure Indirect Spending And General Allocation Fund on Poverty In Manado City. The data type in this study is secondary data processed using multiple regression analysis techniques with Ordinary Least Square (OLS) method. The data used is secondary data in the form of timeseries which is annual data (2004-2018). The results of this study showed that partial research, Direct Expenditure has no statistically significant effect on poverty rates in Manado city, Indirect Spending has a statistically significant effect on Poverty in Manado city, and the General Allocation Fund has no statistically significant effect on Poverty in manado city. Meanwhile, simultaneous research on Indirect Direct Expenditure (BTL) and General Allocation Fund (DAU) had a significant effect jointly on poverty in Manado.*

Keywords: *Poverty, Direct Expenditure, Indirect Spending, General Allocation Fund*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah di Indonesia maka perencanaan pembangunan di daerah harus direncanakan dengan baik. Pembangunan akan berjalan baik apabila rencana penganggaran pembangunan dilakukan dengan cermat yang ditopang oleh sumber-sumber pendapatan daerah yang telah dikelola dengan baik. Salah satu tujuan perencanaan pembangunan yang baik adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau dengan kata lain mengubah kondisi kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Salah satu masalah dalam pembangunan adalah kemiskinan.

Salah satu negara yang masih dibelit oleh masalah sosial ini adalah Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih terjebak dalam masalah kemiskinan yang hingga saat ini belum sepenuhnya teratasi. Adam Smith (1776) "Tidak ada masyarakat yang makmur dan bahagia, jika sebagian besar penduduknya berada dalam kemiskinan dan kesengsaraan" Konsep pembangunan harus didefinisikan kembali sebagai upaya menghapuskan berbagai bentuk masalah umat manusia salah satunya masalah kemiskinan. Jika hanya dihitung berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, maka mungkin pembangunan yang sudah dijalankan selama ini membawa keberhasilan besar, tetapi apabila diukur atas dasar jumlah kesempatan kerja baru, pemberantasan kemiskinan, pembangunan selama ini tidak banyak membuahkan hasil. (Michael P. Todaro 2006)

Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara baik kabupaten dan kota merupakan salah satu prioritas pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melalui Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) dengan target penurunan kemiskinan sampai 40 % ditahun 2021 sehingga semua program dan kegiatan diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan Usaha pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan kesejahteraan dalam hal ini mengurangi tingkat kemiskinan juga dapat dilihat dari besaran dana dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikucurkan setiap tahunnya.

Tabel 1 Data Kemiskinan Kota Manado 2014-2018

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2004	144.230	16.145	4,14
2005	155.301	19.966	5,09
2006	174.277	26.66	6,73
2007	189.167	21.657	5,43
2008	196.092	26.654	6,59
2009	221.951	25.704	6,32
2010	247.809	26.722	6,32
2011	256.545	22.44	5,4
2012	265.589	20.427	4,91
2013	279.91	20.546	4,88
2014	286.498	20.185	4,74
2015	313.597	23.960	5,63
2016	334.732	22.410	5,24
2017	353.018	23.390	5,46
2018	364.820	23.214	5,38

Sumber; BPS Kota Manado

Berdasarkan gambar diatas presentase kemiskinan di Kota Manado pada tahun 2004-2018 mengalami fluktuasi. Dilihat dari tabel diatas persentase angka kemiskinan pada tahun 2004-2006 mengalami kenaikan dan berada pada angka 6,73% dan kembali turun pada tahun 2007 menjadi 5,43%. Lonjakan yang cukup tinggi juga terjadi pada tahun 2008 yaitu berada pada angka 6,59 dibandingkan angka kemiskinan tahun sebelumnya yang berada pada angka 5,43. Padahal jika dilihat naik turunnya persentase tingkat kemiskinan di kota Manado pada tahun tahun lainnya hanya mengalami perubahan yang tidak cukup tinggi. Dengan demikian presentase kemiskinan di kota Manado yang paling tertinggi pada tahun 2006 sebesar 6,73%, presentase kemiskinan yang paling rendah yaitu pada tahun 2004 sebesar 4,14%.

Kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah daerah berupa belanja langsung dan belanja tidak langsung diharapkan dapat menanggulangi masalah kemiskinan sehingga angka kemiskinan di Sulawesi Utara dapat mengalami penurunan. Belanja daerah, atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah (pemerintah daerah), di samping pos pendapatan pemerintah daerah.

Pengeluaran pemerintah daerah melalui belanja langsung maupun belanja tidak langsung merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif, selain kemampuan intervensi lainnya dari pemerintah. Pengalokasian Dana Alokasi Umum pemerintah pusat ke pemerintah daerah kabupaten/kota diperuntukan untuk pemerataan kemampuan keuangan dalam mendanai setiap kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja langsung terhadap tingkat kemiskinan di kota Manado.
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan di kota Manado.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap tingkat kemiskinan di kota Manado.
4. Untuk mengetahui pengaruh belanja langsung, belanja tidak langsung dan Dana Alokasi Umum terhadap kemiskinan di kota Manado secara bersama-sama.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Kemiskinan secara umum dapat diartikan sebagai kondisi individu penduduk atau keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya secara layak. Namun beberapa institusi atau pihak telah menetapkan acuan dalam penentuan kriteria penduduk miskin. Terjadinya kemiskinan penduduk secara garis besar disebabkan oleh faktor eksternal dan internal penduduk. Besarnya Kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, yang biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Sebagai suatu ukuran relative, kemiskinan relatif dapat berbeda menurut Negara atau periode didalam suatu Negara. (Tulus T.H Tambunan, 2014:106).

Belanja Langsung

Menurut permendagri Nomor 13 tahun 2006 belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penerahan sumber daya yang baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesmua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan pengeluaran (*Output*) dalam bentuk barang/jasa. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan suatu program atau pengeluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Belanja Tidak Langsung

Menurut permendagri No 13 Tahun 2006 belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : Belanja pegawai; Bunga; Subsidi; Hibah; Bantuan Sosial; Belanja bagi Hasil; Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengurus rumah tangganya dengan mengurangi peran pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerahnya

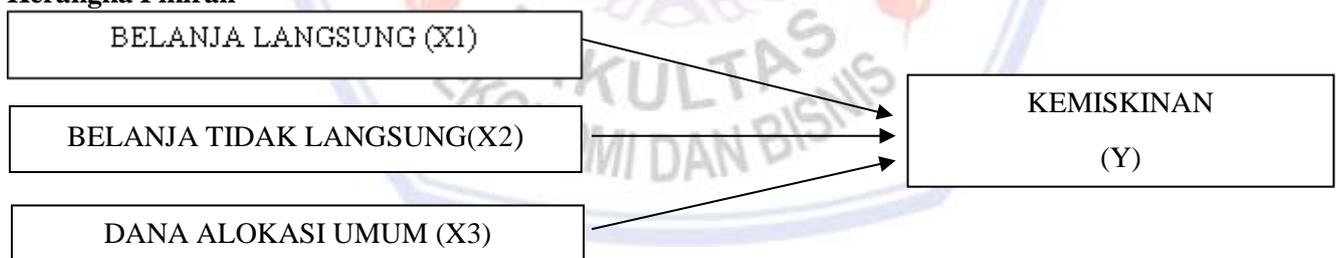
Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Jouzar Farouq Ishak (2017) dengan judul pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap kemiskinan di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat. Namun, belanja tidak langsung berdampak positif terhadap kemiskinan di wilayah yang sama pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Konny Joula Ellen Rasu (2019) dengan judul analisis pengaruh dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap tingkat kemiskinan di kota manado. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaruh dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap tingkat kemiskinan di kota manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan artinya jika pendapatan asli daerah meningkat, tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan artinya apabila dana lokasi umum meningkat maka tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan akan tetapi tidak signifikan. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan artinya apabila dana lokasi khusus meningkat maka tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan akan tetapi tidak signifikan. Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan artinya apabila dana bagi hasil meningkat akan menurun angka kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Teddy Desly Minggu, Veckie A, Rumat, Debby Ch. Rotinsulu (2016) dengan judul analisis pengaruh belanja langsung, belanja tidak langsung dan investasi swasta terhadap kemiskinan di kota bitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) di Kota Bitung memiliki hubungan yang negatif dengan berubahnya Belanja Langsung, perkembangan jumlah penduduk miskin (JPM) di Kota Bitung memiliki hubungan yang negatif dengan meningkatnya Belanja Tidak Langsung, dan JPM di Kota Bitung memiliki hubungan yang negatif dengan bertambahnya Investasi swasta.

Kerangka Pikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber: dikembangkan oleh penulis

Hipotesis/Dugaan

- H₁: Diduga belanja langsung memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan secara individu
- H₂: Diduga belanja tidak langsung memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan secara individu
- H₃: Diduga dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan secara individu
- H₄: Diduga belanja langsung belanja tidak langsung dan dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan secara individu bersama-sama.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data berasal dari berbagai sumber yang ada antara lain: BPS (Badan Pusat Statistik), visualisasi data apbd tahun 2011-2018, dan beberapa referensi jurnal-jurnal ilmiah.

Analisis Regresi Berganda

Dalam analisis ini dilakukan dengan bantuan program Eviews. Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai hasil penelitian ini serta dalam rangka pengujian hipotesis sebagai jawaban sementara untuk pemecahan permasalahan yang dikemukakan dapat dimodelkan dalam persamaan berikut dengan data yang ditranformasikan ke dalam bentuk *Natural Logaritma* (Ln):

$$\ln GK = \beta_0 + \beta_1 \ln BL + \beta_2 \ln BTL + \beta_3 \ln DAU + e$$

dimana:

$\ln GK$ = Garis Kemiskinan

$\ln TSB$ = Belanja Langsung

$\ln BTL$ = Belanja Tidak Langsung

$\ln DAU$ = Dana Alokasi Umum

e = error

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi sekaligus koefisien elastisitas.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Damodar, G,2003) Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Adanya Multikolinieritas dapat dengan metode *VIF* (*variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Model regresi yang normal yang memiliki batas angka *tolerance* lebih kecil dari 1, sedangkan batas angka untuk *VIF* adalah lebih kecil dari 10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Breusch-Pagan-Godfrey test. Breusch-Pagan-Godfrey test ini adalah uji untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam suatu model. (Winarno, 2015)

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terdapat korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi.

Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam software Eviews normalitas sebuah data dapat diketahui dengan membandingkan nilai *Jarque-Bera* (*JB*) dan nilai *Chi-Square*. Uji *JB* didapat dari *histogram normality* yang akan kita bahas dibawah ini. Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : Data tidak berdistribusi normal

H_1 : Data berdistribui normal

Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 ditolak

Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 diterima

HASIL DAN PEMBAHASAN**Tabel 2 Hasil Estimasi OLS**

Variabel	Coefficients	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	2.451406	0.491317	4.989461	0.0004
BL	0.003474	0.019385	0.179228	0.861
BTL	0.582311	0.056822	10.24802	0
DAU	-0.089295	0.068836	-1.297223	0.2211

R² 0.988874

F-statistic 45.07742

Sumber: Hasil Olahan Eviews 10

Hasil estimasi di atas dapat dijelaskan pengaruh variabel bebas yaitu BL, BTL dan DAU terhadap Kemiskinan sebagai berikut :

- Koefisien belanja langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Garis Kemiskinan.
- Koefisien belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka garis kemiskinan
- Koefisien dana alokasi umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap garis kemiskinan.

Uji F

Hasil uji simultan diperoleh nilai F hitung sebesar $45.07742 > 3,59$ F tabel dengan tingkat garis kemiskinan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka H₀ ditolak dan menerima H₁, maka dapat dikatakan bahwa Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh terhadap Kemiskinan.

Uji t

Nilai t dari hasil perhitungan eviews yang tertera dalam kolom t, dengan Derajat kebebasan (DK) dengan ketentuan: $DK = n - 4$ atau $15 - 4 = 11$. Dari ketentuan tersebut diperoleh angka tabel 1,796.

Koefisien Determinasi

Nilai *adjusted R2* adalah 0,988874. hal ini menunjukkan bahwa 98,887% Kemiskinan dipengaruhi oleh variabel belanja langsung (BL), belanja tidak langsung (BTL), dan dana alokasi umum (DAU). Sedangkan sisanya sebesar 1,113% dipengaruhi faktor yang diluar model yang mampu mempengaruhi Kemiskinan.

Uji Asumsi Klasik**Uji Multikolinearitas****Tabel 3 hasil Uji Multikolinearitas**

	BL	BTL	DAU
BL	1	0.654477	0.590292
BTL	0.654477	1	0.959859
DAU	0.590292	0.959859	1

Sumber: Hasil Olahan Eviews 10

Dari hasil pada tabel di atas menunjukkan bahwa antara variabel BL dengan BTL tidak terjadi multikolinieritas (nilai 0,65 kurang dari 0,80), dan BL dengan DAU juga tidak terjadi multikolinieritas (nilai 0,59 kurang dari 0,80) dan antara BTL dengan DAU terjadi multikolinieritas yaitu dengan nilai sebesar 0,95 lebih besar dari 0,80.

Uji Heteroskedastisitas**Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

F-statistic	0.932676	Prob. F(9,10)	0.5498
Obs*R-squared	8.314222	Prob. Chi-Square(9)	0.4034
Scaled explained SS	2.374867	Prob. Chi-Square(9)	0.9673

Sumber: Hasil Olahan Eviews 10

Berdasarkan tabel Hasil uji heteroskedastisitas evIEWS 10 menunjukkan bahwa pada nilai probabilitas Chi-Squared lebih besar dari $\alpha=5\%$ ($0,4034 > 0,05$). Artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

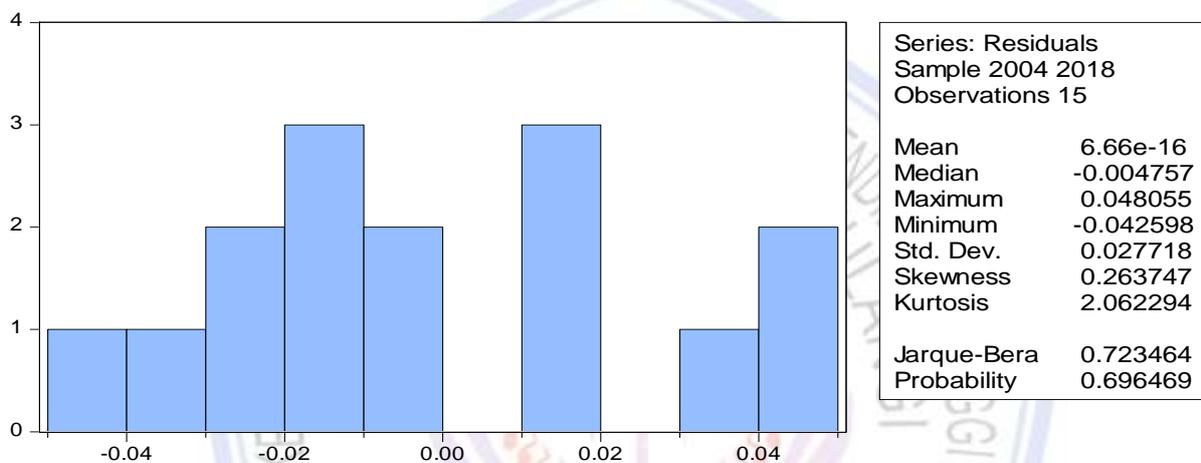
Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	3.20013	Prob. F(2,14)	0.892
Obs*R-squared	6.23391	Prob. Chi-Square(2)	0.0643

Sumber: Hasil Olahan Eviews 10

Hasil uji autokorelasi evIEWS 10 menunjukkan bahwa pada nilai probabilitas Chi-Squared lebih besar dari $\alpha=5\%$ ($0,0643 > 0,05$). Artinya model regresi tidak mengandung autokorelasi, sehingga model ini layak digunakan.

Uji Normalitas



Gambar 2. Uji Normalitas

Sumber: Hasil Olahan Eviews 10

Berdasarkan gambar 2 dari hasil uji normalitas didapati hasil bahwa data terdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha=5\%$ ($0,69646 < 0,05$).

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja pemerintah khususnya pos belanja langsung pemerintah kota Manado terhadap penduduk miskin di kota Manado yang belum bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin yang ada di kota Manado. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andyka Arief Pratomo (2015) bahwa belanja langsung tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja tidak langsung berpengaruh signifikan secara statistik terhadap garis kemiskinan Hasil ini sesuai dengan kaidah teori ekonomi dimana pengeluaran pemerintah akan mengurangi atau menurunkan tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk miskin. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian) dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentunya akan mengurangi kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Teddy Desly Minggu (2016) dan bahwa belanja tidak langsung berpengaruh signifikan dalam pengurangan angka kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara statistik terhadap garis kemiskinan. Hal ini tidak sesuai teori bahwa semakin tinggi tingkat DAU maka akan mengurangi tingkat kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa penyerapan dana alokasi umum masih belum bisa mengurangi angka kemiskinan di kota Manado sebaiknya pemerintah lebih memprioritaskan alokasi DAU ini pada bidang-bidang yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik atau fasilitas-fasilitas yang mendorong terjadi

kesejahteraan masyarakat dalam hal ini untuk mengurangi angka kemiskinan. Hal ini sesuai dengan penelitian Andyka Arief Pratomo (2015) bahwa DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap garis kemiskinan.

Untuk hasil penelitiannya secara bersamaan atau simultan belanja langsung belanja tidak langsung belanja dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagai belanja daerah dan dana alokasi umum sebagai pendapatan daerah. Usaha pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan kesejahteraan dalam hal ini mengurangi tingkat kemiskinan juga dapat dilihat dari besaran dana Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikurangkan setiap tahunnya. Namun realisasi belanja yang diharapkan dapat menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan tingkat kemiskinan adalah melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung dan Dana Alokasi Umum di Kota Manado.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didapatkan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Belanja Langsung (BL) tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap Kemiskinan di kota Manado.
2. Belanja Tidak Langsung (BTL) berpengaruh signifikan secara statistik terhadap Kemiskinan di kota Manado.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap Kemiskinan di kota Manado.
4. Belanja Langsung (BL), Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Kemiskinan di kota Manado.

Saran

Saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini untuk pihak-pihak yang berkepentingan di masa mendatang, demi pencapaian manfaat yang optimal dan pengembangan dari hasil penelitian. Dalam mengurangi angka kemiskinan sebaiknya pemerintah lebih memprioritaskan alokasi DAU ini pada bidang-bidang yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik atau fasilitas-fasilitas yang mendorong terjadi kesejahteraan masyarakat dalam hal ini untuk mengurangi angka kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andyka A Pratomo (2015) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di DKI Jakarta. *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang 2015
https://www.google.co.id/url?q=http://eprints.undip.ac.id/45455/1/02_PRATOMO.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiK35zruvLvAhWgILcAHbIkBGwQFjABegQICRAB&usq=AOvVaw2pDIUCowwfTsKTq58O-IwA Diakses pada 16 April, 2019
- Badan Pusat Statistik Kota Manado <http://manadokota.bps.go.id/statictable/2015/04/27/104/garis-kemiskinan-dan-penduduk-miskin-di-kota-manado-.html> diakses pada tanggal 17 maret 2019
- Damodar, G. (2003) *Ekonometrika Dasar. Terjemahan* Jakarta: Erlangga
- Jouzar Farouq Ishak (2017) Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis (JAB)* ISSN 1412-0825
<http://dx.doi.org/10.20961/jab.v17i1.212> Diakses pada 25 Maret 2019
- Konny Joula Ellen Rasu (2019) Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan Di kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* Vol 20 No.4 (2019)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/32803> Diakses pada 9 Maret 2019
- Michael P Todaro, Stephen C Smith (2006) *Pembangunan Ekonomi edisi ke-9, jilid 11*, Penerbit Erlangga Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Teddy Desly Minggu, Veckie A, Rumate, Debby Ch. Rotinsulu (2016) Analisis Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung Dan Investasi Swasta Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* Vol 18 No.2 (2016)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekcd/article/view/12793> Diakses pada 19 Maret 2019

Tulus T.H Tambunan (2014) *Perekonomian Indonesia Era Orde Lama Hingga Jokowi* Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Winarno Wing Wahyu. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews edisi 4*. Jogjakarta: UPP STIM YKPN.

